

WARTA

KEBERLANJUTAN

Mendorong Rantai Pasok Pertanian Berkelanjutan di Indonesia



Heru Tri Widarto Sesdijten Perkebunan Kementerian Pertanian bersama Tim GIZ di acara BUNEX 2024 ©Kementerian Pertanian

GIZ Mendukung Kementan di BUNEX 2024

Wulandari Wardani,
Spesialis Komunikasi

[12-14 September 2024] GIZ mendukung Kementerian Pertanian dalam kegiatan pameran Perkebunan Expo (BUNEX) 2024 di Indonesia Convention Center, BSD. *Exhibitor* dalam BUNEX kali ini mencakup perwakilan dari Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian dari seluruh Indonesia. Komoditas yang diangkat dalam BUNEX 2024 meliputi kopi, coklat, karet, dan kelapa sawit dari pekebun lokal.



Kegiatan di Pusat Penelitian Kelapa Sawit Parindu, Sanggau ©Pieter Andas Parinatha/GIZ

Menabur Benih - Benih Keberlanjutan di Kalimantan Barat

Cecilia Novarina, Advisor Pengetahuan dan Komunikasi

Pada tanggal 23-27 September 2024, saya berkesempatan bergabung dengan Bapak Ralf Sanftenberg, Kepala Divisi Pertanian dan Pembangunan Pedesaan GIZ, dalam perjalanannya ke Kalimantan Barat. Provinsi yang indah dengan hutan hujan yang rimbun dan budayanya yang kental ini memberikan sedikit gambaran mengenai tantangan dan peluang dalam mewujudkan perkebunan berkelanjutan di Indonesia.

Setelah kami meninggalkan hiruk pikuk kota Jakarta, rombongan kami menuju kota Pontianak, di mana kami bertemu dengan perwakilan dari PT. Bintang Borneo Persada. Sungguh menginspirasi melihat bagaimana perusahaan ini menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi

Lanjut ke halaman 2...

- Menabur Benih - Benih Keberlanjutan di Kalimantan Barat
- GIZ Mendukung Kementan di BUNEX 2024
- Upaya Kolaboratif GIZ dan Bappenas untuk Mendorong Indonesia yang Berkelanjutan
- Proyek ICARE dan GIZ Bekerja Sama dalam Mengadakan Sosialisasi STDB Kopi dan Penetapan Lokasi dan Perkebunan Tambahan
- Upaya Memperkuat Kolaborasi antara Indonesia, Malaysia, dan Komisi Eropa dalam Pertemuan *Ad-Hoc Joint Task Force* untuk EUDR yang Ketiga
- Pelatihan Tata Kelola Komoditas Berkelanjutan untuk Manajemen Koperasi dan Tim ICS
- Mengatasi Kesenjangan Pendapatan Hidup (*Living Income*) Pekebun Kopi di Kabupaten Bandung
- Dukungan Skema Premi Bersama Mitra Sektor Swasta dan Pemerintah Daerah untuk Program Asuransi Cuaca Kakao di Sulawesi Tengah

dengan kelestarian lingkungan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Merry, Direktur PT. Bintang Borneo Persada, "Harga untuk karet tertelusur lebih tinggi...kami mulai segregasi dari titik pengumpulan dan memastikan karet tertelusur ditandai [untuk menghindari pencampuran]."

Hari berikutnya, kami melanjutkan perjalanan ke kota Sanggau, rumah dari tanaman Sabang Merah. Di sini, kami bertemu dengan pekebun kelapa sawit swadaya yang memperjuangkan penghidupan yang lebih baik dengan menerapkan praktik-praktik perkebunan yang berkelanjutan. Bapak Donatus, Kepala Desa Hibun, menekankan bahwa peran kelompok tani di Desa Hibun penting untuk memberikan pendampingan pada pekebun mengenai perlindungan hutan. Beliau juga menambahkan bahwa menjaga hutan sangat penting bagi kita dan generasi ke depan.

Selain memberikan pendampingan bagi pekebun sawit swadaya, tahun ini GIZ mulai mengeksplorasi pendampingan kepada kelompok tani perempuan lewat mendorong kebun hortikultura untuk mendapatkan penghasilan alternatif dan juga penanganan *stunting* di area tersebut. Ketika ditanya, untuk siapakah uang hasil penjualan kebun ini, Ibu Magdalena, bendahara kelompok tani Katus menjawab jenaka, "Tentu buat ibu-ibu dong, Mbak. Kebun ini kan dari kita dan untuk kita."

Perjalanan kami tidak akan lengkap tanpa mengunjungi Taman Kehati. Kawasan konservasi yang menakjubkan ini merupakan bukti komitmen pemerintah terhadap perlindungan lingkungan. Di taman ini, Ibu Herlina Matana Pasinggi, Kepala Divisi Ruang Terbuka Hijau sekaligus Kepala Taman Kehati, menyatakan bahwa kita harus melindungi hutan untuk menjaga ekosistem



Bapak Ralf Sanftenberg bersama dengan Pj. Bupati Sanggau, Bapak Suherman S.H., M.H.
©Pieter Andas Parinatha/GIZ

sehingga masyarakat sekitar bisa mengambil hasil hutan, termasuk melestarikan kebudayaan dan situasi sosial ekonomi masyarakat.

Waktu kami di Kalimantan Barat ditutup dengan kunjungan ke Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Parindu, di mana kami bertemu dengan Bapak Andi Damanik, Manager PPKS Parindu yang bekerja tanpa lelah untuk mengembangkan solusi inovatif bagi industri kelapa sawit. Menurut beliau, cara mengatasi masalah yang dihadapi petani sawit di Sanggau harus dengan mengeksplorasi solusi lokal. Solusi yang berhasil di tempat lain belum tentu efektif kalau diterapkan di Sanggau.

"Perjalanan ini membuka mata saya mengenai pentingnya kerja-kerja yang dilakukan GIZ di sini. Dari awal sampai akhir perjalanan, saya melihat bagaimana semua hal yang dilakukan oleh berbagai pihak saling mengisi dalam menciptakan situasi yang lebih baik, bagi untuk pekebun kecil, industri, maupun pemerintah," ujar Pak Ralf ketika rombongan akan meninggalkan PPKS Parindu. Dengan bekerja sama, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dan adil bagi Kalimantan Barat dan Indonesia secara keseluruhan.



Narasumber dari kegiatan Sosialisasi STDB di Tanggamus, Lampung ©Wulandari Wardani/GIZ

Proyek ICARE dan GIZ Bekerja Sama dalam Mengadakan Sosialisasi STDB Kopi dan Penetapan Lokasi dan Perkebunan Tambahan

Wulandari Wardani, Spesialis Komunikasi



Upaya Kolaboratif GIZ dan Bappenas untuk Mendorong Indonesia yang Berkelanjutan

Dr. Silfi Iriyani, S.Hut.,M.Si., Advisor Kebijakan Lingkungan Hidup & Efisiensi Sumberdaya

Perjalanan penyiapan pelaksanaan proyek SAFE telah lepas landas menuju fase pelaksanaan. Dikukuhkan melalui dua agenda besar, yaitu pertemuan penyusunan rencana kerja periode 2024 – 2026 dan penandatanganan Perjanjian Implementasi (*Implementation Agreement/IA*) proyek SAFE bersama Bappenas.

Kegiatan lokakarya penyusunan rencana kerja yang dilakukan pada tanggal 20-21 Agustus 2024 dilakukan bersama dengan mitra proyek SAFE yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, Bappenas dan GIZ. Dalam kegiatan ini, pihak Bappenas menekankan bahwa SAFE akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, bio-ekonomi, dan tema-tema pembangunan prioritas bidang pangan dan pertanian; sehingga pelaksanaan proyek SAFE akan berkontribusi pada transisi inklusif dari komoditas-komoditas pertanian.

Pelaksanaan proyek SAFE juga berkontribusi kepada pencapaian agenda Indonesia dan global untuk melindungi hutan dan menekan dampak negatif perubahan iklim. Hal ini akan dilakukan dengan mengurangi dampak negatif dari praktik-praktik pertanian, termasuk dengan melacak dampak negatif pertanian terhadap deforestasi. Mengingat pentingnya pertanian bagi perekonomian, terutama bagi pekebun kecil. SAFE juga akan mendorong transformasi ekonomi inklusif untuk memastikan bahwa pekebun kecil akan dilibatkan dalam upaya-upaya yang akan meningkatkan penghidupan mereka.

Sebagai hasil dari lokakarya perencanaan ini, para pihak telah menyepakati rencana kerja dan mekanisme koordinasi yang dirumuskan bersama antara Bappenas, GIZ, Pemerintah Daerah (Pemda) Kalimantan Barat, Pemda Sulawesi Tengah, Pemda Lampung.

Pada 28 Agustus 2024 silam, IA sebagai dasar pelaksanaan proyek SAFE telah ditandatangani oleh Bappenas dan GIZ. Perjanjian ini memuat rencana kerja proyek dan alur pelaksanaan proyek SAFE secara keseluruhan, termasuk kontribusi SAFE pada area prioritas bidang Pangan dan Pertanian Bappenas.

“



Indonesia ke depan akan menghadapi banyak pembaharuan termasuk pembaharuan pembangunan pertanian berkelanjutan, pendekatan yurisdiksi yang berkelanjutan, ekonomi hijau, dan pembangunan rendah karbon menuju *Net Zero Emission*.

Dr. Vivi Yulaswati, M.Sc., Deputy Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas

“



“Pelaksanaan proyek SAFE merupakan bagian dari upaya pencapaian Indonesia Emas 2045. Penyelarasan kegiatan SAFE akan berpedoman dengan target prioritas pembangunan nasional dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).”

Jarot Indarto, SP, MT, MSc, Ph.D, Direktur Pangan Pertanian Bappenas

Pada 1 Agustus 2024, GIZ dan Program *Integrated Corporation of Agriculture Resources Empowerment* (ICARE) mengadakan sosialisasi Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) serta penetapan lokasi dan pekebun kopi tambahan untuk program ICARE di Hotel Royal Gisting, Tanggamus, Lampung.

Kegiatan ini bertujuan untuk menginformasikan agenda penetapan lokasi pekebun tambahan untuk program ICARE kepada instansi pemerintah daerah, pekebun, kelompok tani, dan pemangku kepentingan lainnya serta mensinergikan kegiatan proyek antara SASCI+

Coffee++ dan program ICARE di Lampung dengan harapan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pekebun akan pentingnya STDB bagi keberlanjutan perkebunan kopi dan mendukung upaya mereka dalam memperoleh STDB. Kementerian Pertanian, ICARE, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Provinsi Lampung, GIZ, dan Nestlé turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Dalam upaya pengaturan dan pengelolaan pengembangan perkebunan milik pekebun, STDB menjadi landasan penetapan berbagai kebijakan usaha perkebunan bagi pekebun,

Lanjut ke halaman 8..

Upaya Memperkuat Kolaborasi antara Indonesia, Malaysia, dan Komisi Eropa dalam Pertemuan Ad-Hoc Joint Task Force untuk EUDR yang Ketiga

Theresa Sila Wikaningtyas,
Advisor untuk Keterlibatan EUDR

Pada tanggal 12 September 2024 yang lalu telah diadakan pertemuan Gugus Tugas (*Ad-Hoc Joint Task Force/JTF*) untuk Peraturan Uni Eropa tentang Produk-produk Bebas Deforestasi (EUDR) yang ketiga di Brussels, Belgia. Pertemuan ini menyediakan ruang konsultasi dan dialog untuk mendorong koordinasi teknis terkait pelaksanaan EUDR antara Pemerintah Indonesia, Pemerintah Malaysia, dan juga Komisi Eropa.

Pada kesempatan ini Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), menyampaikan beberapa perkembangan terkait persiapan Indonesia menuju penerapan peraturan EUDR, antara lain kemajuan program percepatan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), Dashbor Nasional untuk Komoditas, serta migrasi STDB ke STDB Elektronik (e-STDB) untuk sektor kelapa sawit.

Pihak Komisi Eropa juga menyampaikan perkembangan terkait dukungan terhadap persiapan penerapan EUDR. Dikatakan bahwa pihak Uni Eropa (*European Union/EU*) telah memperbarui daftar pertanyaan (*Frequently Asked Questions/FAQ*)¹ dengan 40 pertanyaan tambahan. Selain itu, pihak EU juga membagikan tentang kemajuan penyusunan dokumen panduan EUDR yang telah dirilis pada tanggal 2 Oktober 2024 dan peluncuran Sistem Informasi yang sudah dapat digunakan sejak 26 Agustus



Kegiatan Memanen Tandani Buah Segar Kelapa Sawit ©Pieter Andas Parinatha/GIZ

2024. Perbaikan terhadap situs web EUDR juga sudah dilakukan dan harapannya dapat diakses dengan lebih baik oleh para pihak.

Pihak EU juga terus memberikan dukungan bagi negara-negara yang terdampak oleh EUDR, termasuk Indonesia dalam mempersiapkan penerapan aturan ini melalui pelaksanaan beberapa kerjasama teknis. Lewat kerjasama teknis ini, pihak EU memberikan dukungan melalui pelibatan para pihak dalam berbagai dialog, pelaksanaan berbagai studi terkait EUDR, dan juga produksi materi-materi informasi terkait EUDR yang ditujukan untuk sektor swasta dan para petani kecil.

Informasi lengkap seputar pelaksanaan EUDR dapat diakses melalui tautan :

https://green-business.ec.europa.eu/deforestation-regulation-implementation_en

1. <https://circabc.europa.eu/ui/group/34861680-e799-4d7c-bbad-da83c45da458/library/e126f816-844b-41a9-89ef-cb2a33b6aa56/details?download=true>

Lima alur kerja JTF



Inklusivitas petani



Skema sertifikasi



Ketertelusuran



Data ilmiah tentang deforestasi dan degradasi hutan



Kerahasiaan data



Peserta dari Pelatihan Tata Kelola Komoditas Berkelanjutan ©Panji Anom/GIZ

Pelatihan Tata Kelola Komoditas Berkelanjutan untuk Manajemen Koperasi dan Tim ICS

Salah satu hal yang dibutuhkan untuk mencapai tata kelola komoditas berkelanjutan adalah peningkatan pengetahuan serta keahlian bagi pengurus koperasi dan tim Sistem Kontrol Internal (*Internal Control System/ICS*) berkaitan dengan standar-standar keberlanjutan yang menjadi tolok ukurnya. Tim ICS merupakan tim yang wajib dibentuk oleh pengurus koperasi dan bertugas untuk memastikan pelaksanaan berbagai standar pengelolaan perkebunan dilakukan dengan baik oleh pekebun rakyat mandiri yang menjadi anggota koperasi. Standar tersebut disusun dalam bentuk Panduan Operasional Standar (*Standard Operating Procedure/SOP*) sesuai dengan panduan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO).

Untuk itu, GIZ menyelenggarakan serangkaian pelatihan bagi pengurus koperasi dan tim ICS pada sembilan koperasi yang ada di Kecamatan Bengalon dan Rantau Pulung, Kutai Timur. Kegiatan ini diikuti oleh total 85 orang secara simultan yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus-21 September 2024.

Topik Utama dalam Pelatihan Tata Kelola Komoditas Berkelanjutan



Panji Anom, Advisor Pertanian
Iwied Wahyulianto, Advisor Senior

Pelaksanaan pelatihan ini menggunakan pendekatan pendidikan bagi orang dewasa yang memberikan ruang terbukanya diskusi interaktif antar peserta pelatihan dengan narasumber/ pelatih dan menempatkan peserta pelatihan sebagai bagian dari proses pembelajaran. Peserta diberikan peran yang lebih luas untuk sekaligus mempraktekkan materi yang diperoleh di dalam ruang kelas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai tim ICS dan pengurus koperasi.

Pelatihan yang juga dipantau oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur ini mendapatkan sambutan yang baik dan memang sejalan dengan program dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang berupaya mendorong sertifikasi pekebun rakyat mandiri. Ke depan sebagai tindak lanjut dari pelatihan ini akan dilaksanakan peningkatan kapasitas pekebun mandiri yang menjadi anggota koperasi melalui kegiatan sekolah lapang pekebun.

Mengatasi Kesenjangan *Living Income* Pekebun Kopi di Kabupaten Bandung

Ernanda Dalimunthe,
Trainee Komunikasi

Konsep "*living income*" (pendapatan hidup layak) mendefinisikan pendapatan yang dibutuhkan sebuah keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, papan, dan perawatan kesehatan, memastikan standar hidup yang layak. Di Kabupaten Bandung, konsep ini diterapkan untuk menilai pendapatan minimum yang seharusnya diperoleh pekebun kecil yang dibandingkan dengan pendapatan aktual mereka. Sebuah studi baru-baru ini mengungkapkan kesenjangan yang signifikan sebesar 50% antara tolok ukur pendapatan hidup layak sebesar IDR 5.455.506 per bulan untuk keluarga beranggotakan empat orang dan pendapatan rata-rata pekebun, yang mencapai IDR 2.754.968. Pendapatan ini juga berada di bawah Standar upah Kabupaten Bandung (IDR 3.492.466) dan ambang batas kemiskinan Bank Dunia (IDR 4.696.613).

Studi yang didukung oleh GIZ, *Living Income Community of Practice* (LiCoP), dan pemangku kepentingan lainnya ini menginspirasi terciptanya

rencana aksi dengan daftar kemungkinan keterlibatan untuk menutup kesenjangan pendapatan ini, yang kemudian menjadi dasar *Living Income Action Plan Workshop* yang diselenggarakan pada 8 Agustus 2024 di Aula Dinas Pertanian Kabupaten Bandung.

Pekebun seperti Juddin dari Ciwidey berbagi pendapatnya mengenai peran penting edukasi dalam meningkatkan praktik pertanian. Ia menjelaskan bagaimana mengikuti program pelatihan yang ditawarkan oleh GIZ dan PT Indocafco meningkatkan produksi dan pendapatan kopinya secara signifikan.

Pembahasan lokakarya difokuskan pada peningkatan produktivitas pekebun dan keterlibatan pemangku kepentingan untuk mendukung pekebun kecil. Peserta dari pemangku kepentingan seperti Dinas Pertanian Bandung, P.T. Indocafco, Ofi, Sucofina, dan Fairtrade berkolaborasi untuk mencari solusi guna meningkatkan pendapatan pekebun, termasuk peningkatan akses terhadap dukungan teknis, pelatihan, dan peluang pasar.

Upaya kolaboratif ini telah menginspirasi keterlibatan pemangku kepentingan yang lebih luas, dengan harapan untuk peningkatan berkelanjutan dalam pendapatan dan mata pencaharian pekebun kopi kecil di Kabupaten Bandung.

Pendapatan yang layak, sebuah tonggak menuju pendapatan yang sejahtera



Bapak Juddin dalam Pelatihan Menanam Bibit Kopi ©Ernanda Dalimunthe/GIZ



Tahukah Kamu?

Jawa Barat merupakan daerah penghasil kopi Arabika terbesar keempat di Indonesia; kopi Arabika menyumbang **59%** dari total luas perkebunan pekebun dan **54%** dari total produksi pekebun di provinsi tersebut.



Dukungan Skema Premi Bersama Mitra Sektor Swasta dan Pemerintah Daerah untuk Program Asuransi Cuaca Kakao di Sulawesi Tengah

M. Nursholiqin, Advisor Sistem Pembiayaan dan Asuransi untuk Akses Pembiayaan di Sektor Pertanian

Pada hari Kamis tanggal 26 September 2024, Blue Marble; lembaga konsultan untuk pelaksanaan pengembangan produk pembiayaan risiko iklim bagi di sektor pertanian yang saat ini tengah fokus mengembangkan produk asuransi parametrik kakao, mengadakan kegiatan pertemuan FGD di Hotel Best Western Plus Coco Palu terkait Dukungan Skema Premi bersama Mitra Sektor Swasta dan Pemerintah Daerah untuk Program Asuransi Cuaca Kakao di Provinsi Sulawesi Tengah.

Selain untuk berkoordinasi dengan para mitra terkait, kegiatan ini mendiskusikan dan menyelaraskan temuan dari survei di pekebun, uji coba prototipe produk asuransi cuaca dan opsi-opsi produk asuransi. Pelaksanaan uji coba implementasi skema asuransi cuaca kakao ini akan dimulai dalam triwulan keempat 2024 dan menasar 1.000 pekebun kakao di Kabupaten Poso dan Sigi.

“Program asuransi cuaca ini memang menarik sekali karena sebagai hal baru yang berbasis teknologi perlu untuk dipelajari bagaimana mengakses data cuaca dari satelit yang digunakan untuk pengukurannya supaya jelas, namun yang terpenting juga adalah perlu cara efektif untuk bagaimana dapat disosialisasikan kepada para pekebun kakao, supaya kemudian dapat dipahami dan diterima dengan mudah oleh mereka.

Muhammad Jauhari

Kepala Bidang Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah/Bapperinda Kabupaten Sigi

Bagaimana asuransi parametrik cuaca hadir & bekerja?



Lanjutan dari halaman 3...

yang informasi pentingnya belum tersebar luas, sehingga banyak pekebun yang belum mendaftarkan lahannya untuk mendapatkan STDB. Sesuai dengan salah satu Tujuan Pembangunan Proyek (*Project Development Objectives/PDO*) tentang Korporasi Pekebun melalui jalur komersial, program ICARE bekerja sama dengan beberapa pihak, termasuk Proyek SASCI+ Coffee++ yang aktif mendukung pengembangan taraf hidup pekebun kopi di Kabupaten Tanggamus dengan pendekatan Pertanian Regeneratif, untuk membantu pekebun setempat dalam menyebarkan pengetahuan tentang STDB dan memperoleh STDB.

Pentingnya keberadaan STDB menjadi keharusan agar lahan milik pekebun dapat diketahui dan terdata di wilayahnya. STDB merupakan salah satu bentuk modal bagi pekebun saat menjual hasil panen atau mengembangkan usahanya. STDB dapat menjadi salah satu bentuk bukti administratif yang sah untuk mendorong peningkatan mutu tanaman karena di dalamnya memuat posisi lahan pekebun, mutu benih, dan hasil panen. Namun, masih sedikit pekebun yang mendaftarkan lahannya untuk mendapatkan STDB, khususnya untuk komoditas kopi. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh minimnya pengetahuan pekebun terkait STDB dan pentingnya melakukan pendaftaran tersebut.

Program ICARE merupakan kerja sama antara Kementerian Pertanian dan Bank Dunia yang



Foto bersama dalam kegiatan Sosialisasi STDB di Tanggamus, Lampung ©Wulandari Wardani/GIZ

dilaksanakan oleh BPSIP untuk mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian. Program ini dilaksanakan di sembilan provinsi, termasuk Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara.

Kegiatan ini dibuka oleh Pejabat Sementara (Pj.) Bupati Tanggamus Mulyadi Irsan dan turut dihadiri oleh Kepala BPSIP Lampung, Dinas Perkebunan Provinsi Lampung sebagai narasumber yang menyampaikan pentingnya STDB, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Plt. Kadisbunnak) Tanggamus, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Holtikultura, Camat Air Nainingan, Camat Pulau Panggung, Camat Ulu Belu, uspika kecamatan talang Padang, para pekebun Gapoktan kecamatan Ulu Belu, Pulau Panggung dan Air Nainingan.

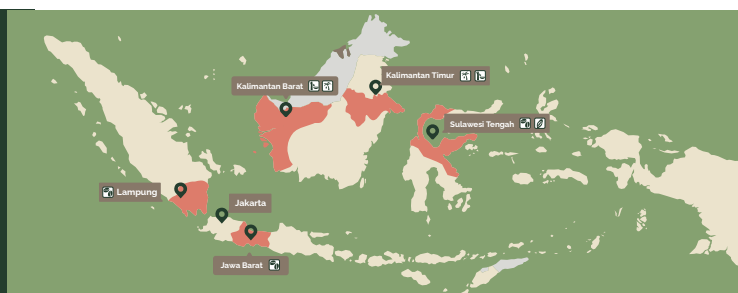
Kalender Kegiatan

Oktober 2024

- ▶ Sekolah Lapangan Petani untuk Kelapa Sawit dan Karet Alam di Kecamatan Rantau Pulung dan Bengalon (meliputi 9 koperasi pekebun kecil di 23 desa)
- ▶ Penggunaan GPS untuk pemetaan lapangan bagi Koperasi Pekebun Kecil
- ▶ Kunjungan Lapangan dalam Rangka Studi Kebijakan dan Teknis Sejarah Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Field Visit for Study Policy and Technical the History Land Tenure Letter (SKPT)
- ▶ Pertemuan Reguler dengan MSF Kapuas Hulu

November 2024

- ▶ Pelatihan QGIS untuk Manajemen Data dan Portal Berbasis Web
- ▶ Pelatihan fasilitasi dan moderasi untuk MSF FORMIKA
- ▶ Tenaga Ahli Profesional sebagai Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu
- ▶ Pembahasan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut



SASCI+, SAFE, dan AgriCRF adalah program yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Kementerian PPN/BAPPENAS, dan GIZ; dan didanai oleh Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ), Uni Eropa (UE), dan Kementerian Luar Negeri Belanda.

Publikasi ini dibuat dengan dukungan finansial dari UE dan BMZ. Isinya merupakan tanggung jawab GIZ dan tidak mencerminkan pandangan UE, BMZ, atau Kementerian Luar Negeri Belanda.

Proyek GIZ SASCI+/SAFE/AgriCRF

Sequis Center Lantai 8, Jl. Jend. Sudirman No. 71, Jakarta 12190

Wulandari Wardani, Spesialis Komunikasi untuk SASCI+, wulandari.wardani@giz.de

Cecilia Novarina, Advisor untuk Pengetahuan dan Komunikasi untuk SAFE dan AgriCRF, cecilia.novarina@giz.de



Publikasi ini dicetak menggunakan kertas daur ulang.